



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DPU-PR.PERKIM

KERJA KERAS
KERJA CEPAT
KERJA TEPAT



Jalan Raja Pandita RT. 10 No. 95 Tg. Belimbing

(0553) 21278

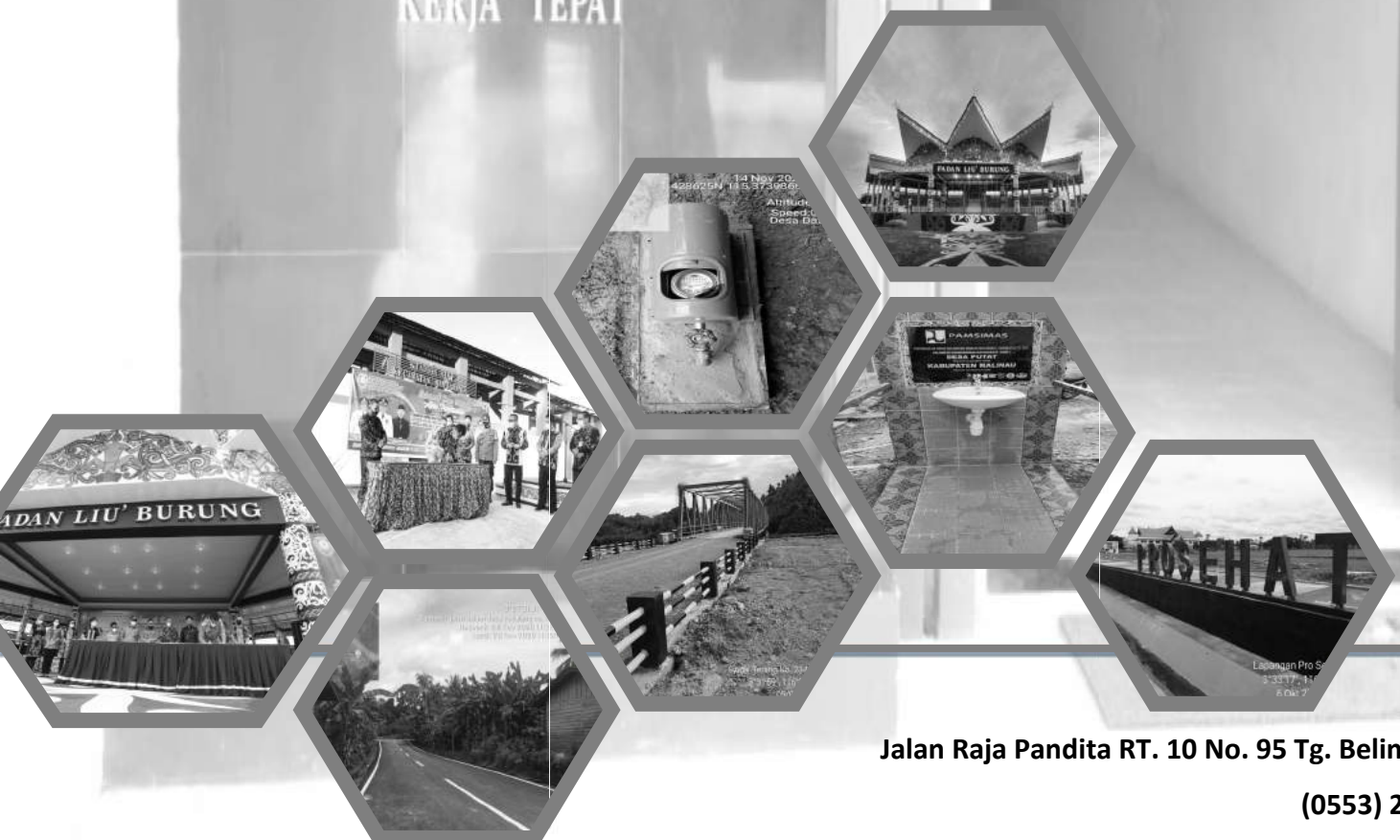
Malinau 77554



LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU
DPU-PR.PERKIM

KERJA KERAS
KERJA CEPAT
KERJA TEPAT



Jalan Raja Pandita RT. 10 No. 95 Tg. Belimbing
(0553) 21278
Malinau 77554

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Malinau ini dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2020. **Laporan ini Memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Capaian Kinerja, Analisis Kinerja dan Realisasi Anggaran.**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.


Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Malinau guna perbaikan program dan kegiatan kedepan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini.

Kepala Dinas PU-PR.PERKIM

Kabupaten Malinau



Dr. TOMY., S.E., M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau 2016-2021.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Ke - 1

Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan Baik di Perkotaan Maupun Perdesaan” diukur melalui indikator kinerja ‘Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap’, yang dicapai melalui kegiatan preservasi jalan, dimana target jalan dengan kondisi mantap pada Tahun 2020 adalah 22,76%. Realisasi sasaran strategis yang berhasil diraih pada akhir Tahun 2020 sebesar 50,43%, dimana deviasi realisasi bertambah sebesar 27,67% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tambahan kegiatan yang sumber pendanaannya dari APBN yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 60.921.365.586,00 dan realisasi anggaran Rp 60.860.637.517,00 dengan progres senilai 99,90%.

Sasaran Strategis Ke - 2

Sasaran strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jembatan Baik di Perkotaan Maupun Perdesaan “ diukur melalui indikator kinerja, yaitu persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap yang dicapai melalui kegiatan preservasi jembatan, dimana target jembatan dengan kondisi mantap pada Tahun 2020 adalah 89,09%. Realisasi sasaran strategis yang berhasil diraih pada akhir Tahun 2020 sebesar 89,09%, dimana output kegiatan 1 unit dengan panjang 120 M. Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 3.571.598.000,00 dan realisasi anggaran Rp 3.570.483.000,00 dengan progres senilai 99,97%.

Sasaran Strategis Ke – 3

Sasaran strategis “Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih “ diukur melalui indikator kinerja, yaitu persentase rumah tangga yang terlayani air bersih yang dicapai melalui kegiatan Perluasan SPAM - Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Sungai Boh, dimana target rumah tangga yang mendapat akses air bersih pada Tahun 2020 adalah 100%. Realisasi sasaran strategis yang berhasil diraih pada akhir Tahun 2020 sebesar 78,31%, dimana output kegiatan 289 SR. Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 3.183.237.800,00 dan realisasi anggaran Rp 3.103.840.800,00 dengan progres senilai 97,51%.

Dalam hal pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas PU-PR.PERKIM relatif mampu mengimplementasikan sesuai dengan rencana kegiatan, walaupun masih pada tingkat rendah, karena faktor sumber pembiayaan yaitu keterbatasan pembiayaan yang berasal dari daerah dan masih mengandalkan dari APBN yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
1.4 Aspek Strategi Organisasi	3
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Sumber Daya Manusia	10
1.7 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	12
1.8 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021	16
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	16
2.1.2 Indikator Kinerja	18
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.1.4 Program	22
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	23
2.3 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Pengukuran Kinerja	31
3.2 Capaian Kinerja	33
3.3 Analisis Capaian Kinerja	33
3.4 Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52

LAMPIRAN..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.....	4
Tabel 1.2 Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.....	5
Tabel 1.3 Kondisi Internal dan Eksternal Dinas.....	5
Tabel 1.4 Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.5 Aparatur Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	18
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Terhadap Visi Misi Daerah.....	20
Tabel 2.4 Daftar Program dan Anggaran Perubahan TA 2020.....	29
Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	33
Tabel 3.2 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	34
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	34
Tabel 3.4 Kondisi Jalan Kabupaten Malinau Tahun 2020.....	36
Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	37
Tabel 3.6 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	40
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	40
Tabel 3.8 Kondisi Jembatan Tahun 2020.....	42
Tabel 3.9 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.....	44
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	44
Tabel 3.11 Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum Tahun 2020.....	47
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Air Bersih Dengan Tahun Sebelumnya.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Posisi Organisasi.....	6
Gambar 1.2 Strategi Diversifikasi Organisasi.....	7
Gambar 1.3 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 1.4 Diagram Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar 1.5 Diagram Aparatur Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	12
Gambar 2.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2020.....	24
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	26
Gambar 3.1 Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2020.....	35
Gambar 3.2 Panjang Jalan Sesuai Kondisi Tahun 2020.....	36
Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2020.....	38
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Tahun 2020.....	42
Gambar 3.5 Kegiatan Perluasan SPAM - Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Sungai Boh Tahun 2020.....	46
Gambar 3.6 Diagram Perbandingan Layanan Air Bersih Tahun 2018 -2020.....	48
Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Perluasan SPAM Tahun 2020.....	49

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja instansi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau di Pasal 4 disebutkan bahwa Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau merupakan Inspektorat Tipe A, Badan Daerah, Lembaga dengan fungsi penunjang lain, Kecamatan dan Dinas Daerah Kabupaten Malinau. Dinas Daerah yang dimaksud diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PR.PERKIM) Kabupaten Malinau adalah Tipe A, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.

Adapun kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

A. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Tata Ruang, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

C. FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 217 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam mengemban misinya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Karena itu perlu dianalisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Bila peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik maka akan menjadi potensi yang

mendorong pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, namun sebaliknya jika peluang dan ancaman tidak teridentifikasi dan diantisipasi dengan baik akan menjadi penghambat bahkan mungkin dapat menggagalkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam NAWACITA yang memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan	20	5	1,00
2	Kuatnya komitmen Kepala Daerah terhadap pembangunan prasarana dasar infrastruktur wilayah	20	5	1,00
3	Kuatnya motivasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	15	5	0,75
4	Tersedianya berbagai sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan	15	4	0,60
5	Tersedianya system LPSE yang mempermudah dan mempercepat proses pengadaan Penyedia Jasa/Rekanan	15	3	0,45
6	Tersedianya material lokal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah	15	4	0,60
	TOTAL	100		4,40

Tabel 1.2 Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Sangat luasnya Wilayah Kabupaten Malinau dengan topografi yang relative berat	20	5	1,00
2	Terbatasnya moda transportasi pada kawasan perbatasan dan pedalaman yang menyebabkan tingginya biaya pembangunan	20	5	0,80
3	Terbatasnya areal pembangunan karna sebagian besar wilayah Malinau masuk dalam kawasan lindung dan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan)	15	4	0,60
4	Terbatasnya kapasitas Penyedia Jasa Lokal (SDM dan Peralatan)	15	4	0,60
5	Terbatasnya suplay material pabrikasi	15	5	0,75
6	Belum terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah	15	5	0,75
TOTAL		100		4,50

Dari analisa identifikasi kondisi internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau maka dapat diketahui titik keseimbangan organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kondisi Internal dan Eksternal Dinas

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
<i>Kekuatan</i>	<i>4,10</i>	<i>Peluang</i>	<i>4,40</i>

<i>Kelemahan</i>	<i>3,85</i>	<i>Ancaman</i>	<i>4,50</i>
<i>Keseimbangan</i>	<i>0,25</i>	<i>Keseimbangan</i>	<i>- 0,10</i>

Pada Diagram Keseimbangan dapat digambarkan posisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Diagram Posisi Organisasi

Kesimpulan Hasil Analisa Lingkungan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau berada pada nilai kekuatan positif namun sekaligus juga berhadapan dengan ancaman yang relative tinggi, sehingga oleh karenanya strategi organisasi yang perlu diambil adalah **Strategi Diversifikasi**.



Gambar 1.2 Strategi Diversifikasi Organisasi

1. 5 STRUKTUR ORGANISASI

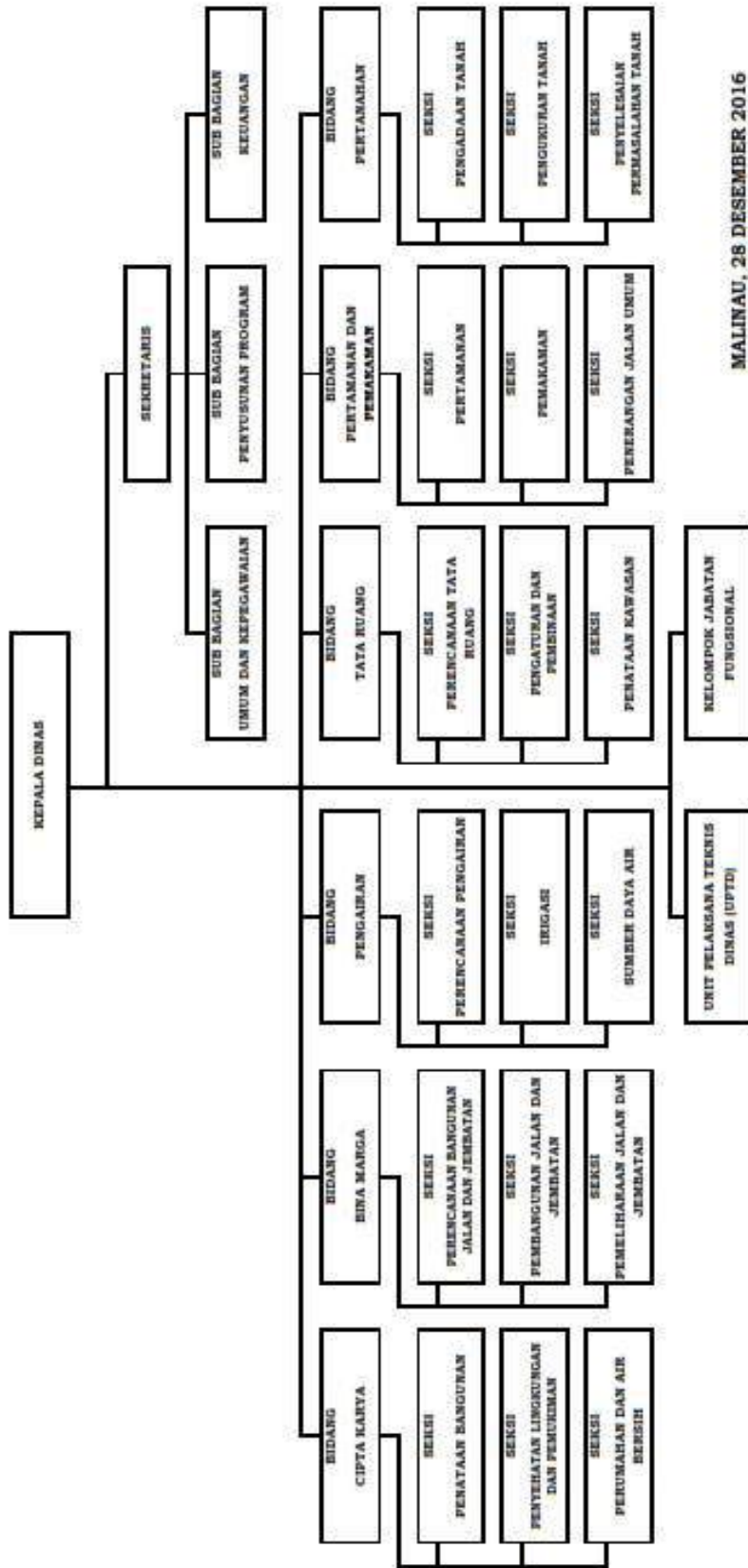
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 diuraikan Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan Sub :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Penyusunan Program
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih
 - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Bangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Sumber daya Air terdiri dari Seksi:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Sumber Daya Air.
6. Bidang Tata Ruang:

- a. Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan
- b. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
7. Bidang Pertamanan dan Pemakaman:
 - a. Seksi Pertamanan
 - b. Seksi Pemakaman
 - c. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan
8. Bidang Pertanahan:
 - a. Seksi Pengadaan Tanah
 - b. Seksi Pengukuran Tanah
 - c. Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2019 dapat dilihat pada halaman berikut ini :

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

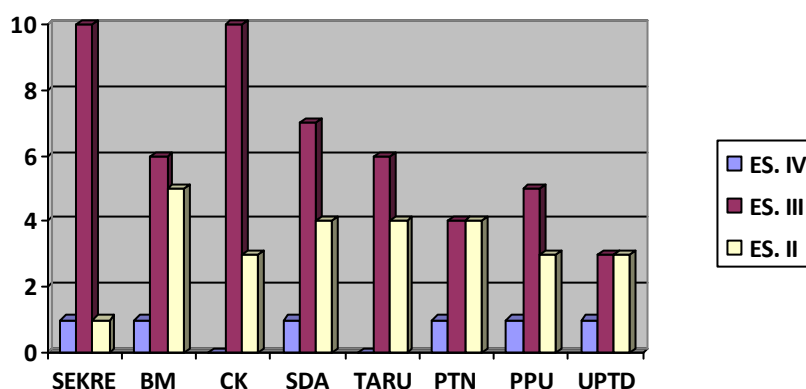


1.6 SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau per 31 Desember 2020, memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang yang terdiri dari 85 (seratus lima) orang PNS, 1 (satu) orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan 82 (delapan puluh dua) staf pelaksana kegiatan / Honor Proyek dan Tenaga Lapangan UPTD, dan 135 (seratus tiga puluh lima) Tenaga Lapangan, Pertamanan dan Pemakaman.

Tabel 1.4 Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan

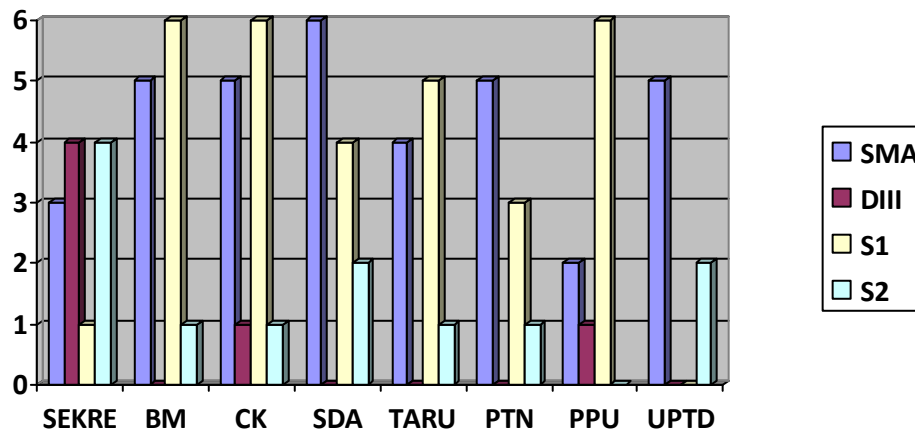
No	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	KEPALA DINAS	1				1
2.	SEKRETARIAT	1	10	1	0	12
3.	BIDANG BINA MARGA	1	6	5	0	12
4.	BIDANG CIPTA KARYA	0	10	3	0	13
5.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	1	7	4	0	12
6.	BIDANG PENATAAN RUANG	0	6	4	0	10
7.	BIDANG PERTANAHAN	1	4	4	0	9
8.	BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM	1	5	3	0	9
9.	UPTD	1	3	3	0	7
	JUMLAH	7	51	27	0	85



Gambar 1.4 Diagram Aparatur Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5 Aparatur Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLTA	D3	S1	S2	S3	
1.	KEPALA DINAS					1	1
2.	SEKRETARIAT	3	2	3	4		12
3.	BIDANG BINA MARGA	5	0	6	1		12
4.	BIDANG CIPTA KARYA	5	1	6	1		13
5.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	6	0	4	2		12
6.	BIDANG PENATAAN RUANG	4	0	5	1		10
7.	BIDANG PERTANAHAN	5	0	3	1		9
8.	BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM	2	1	6	0		9
9.	UPTD	5	0	0	2		7
	JUMLAH	35	4	33	12	1	85



Gambar 1.5 Diagram Aparatur Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

1.7 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

A. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Malinau sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa.

B. Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antardesa, antarkecamatan antarkabupaten dan antarnegara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antardesa dan antarkecamatan. Selain itu, Pembangunan jalan Negara dan jalan provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

C. Permasalahan Air Minum

Permasalahan Air Minum Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian laporan kinerja ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

A. Bagian Awal LKJIP

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table dan halaman daftar gambar.

B. Bagian Utama LKjIP

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, dasar pembentukan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, aspek strategi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini terdiri dari :

1. Rencana Strategis 2016 – 2021 yang berisi tentang tujuan dan sasaran, indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan serta program – program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan selama 5 tahun
2. Rencana Kinerja Tahunan yang berisi tentang sasaran strategis, indikator Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan target kinerja selama 1 tahun anggaran pelaksanaan
3. Perjanjian Kinerja yang berisi tentang janji kerja oleh seluruh pejabat eselon, baik eselon 2, 3, maupun eselon 4 terhadap seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini terdiri dari pengukuran kinerja, gambaran hasil capaian kinerja dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil capaian kinerja berikut realisasi anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

C. Bagian Akhir LKJIP

Bagian akhir dari laporan ini berisi tentang daftar lampiran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang mencakup Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program Kerja baik program utama maupun program pendukung yang akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada hasil identifikasi dan analisis lingkungan tersebut, maka tujuan adalah suatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan isu-isu dan analisis stratejik.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Malinau seperti yang diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun di perdesaan	➤ Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	17,10 %	18,81 %	20,69 %	22,76 %	25,04 %
		Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun di perdesaan	➤ Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	0	85,45 %	87,27 %	89,09 %	94,54 %
2.	Mewujudkan peningkatan akses desa terhadap air bersih	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih	➤ Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	100 %	100%	100%	100%	100%

2.1.2 INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA
1	Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perbatasan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Panjang jalan mantap}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$
		Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perbatasan	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan mantap}}{\text{Total jumlah jembatan}} \times 100\%$
2	Mewujudkan peningkatan akses desa terhadap air bersih	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rumah tangga pada tahun (n)}} \times 100\%$

2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Terhadap Visi Misi Daerah

<p>VISI :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun</p>			
<p>MISI III :</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten</p>	<p>Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perbatasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan pembangunan jalan • Membangun jalan sesuai perencanaan dan skala prioritas daerah • Survey kondisi jalan secara rutin • Meningkatkan kualitas jalan melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan skala prioritas penanganan jalan kabupaten. • Kualitas jalan dengan kondisi mantap • Memudahkan mobilitas masyarakat

	Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan pembangunan jembatan • Membangun jembatan sesuai perencanaan dan skala prioritas daerah • Survey kondisi jembatan secara rutin • Meningkatkan kualitas jembatan melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan skala prioritas penanganan jembatan kabupaten. • Kualitas jembatan dengan kondisi mantap • Memudahkan mobilitas masyarakat
2. Mewujudkan peningkatan akses desa terhadap air bersih	Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan skala prioritas penanganan • Penyediaan air bersih dan air minum dengan meningkatkan partisipasi RT dan dunia usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan kumuh kabupaten.

2.1.4 PROGRAM

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan dievaluasi pada masa akhir tahun anggaran. Berikut program – program yang diakomodir oleh Dinas PUPR – PERKIM pada tahun 2020:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong –Gorong
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
8. Program pengembangan sistem informasi pertanahan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
14. Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman
15. Program Perencanaan Tata Ruang
16. Program Pemanfaatan Ruang
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran sasaran dan indikator kinerja secara tahunan berdasarkan tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan :



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 JL. RAJA PANDITA RT. 1 NO. 96 MALINAU HULU TELP./FAX. (0653)21276
MALINAU

RENCANA KERJA TAHUNAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perbatasan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	22,76	22,76
2.	Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perbatasan	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	%	89,09	89,09
3.	Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	%	100	87

Malinau, 07 September 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang, Perumahan dan
 Kawasan Permukiman
 Kabupaten Malinau

Dr. TOMY, SE, M.Si
 NIP. 19710110 199803 1 009

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN MALINAU

OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6			7			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	1	1	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai honorer yang dibiayai	Kab. Malinau	27 orang	1.026.719.500,00	27 orang	1.026.719.500,00	APBD
			2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibiayai	Kab. Malinau	4 orang	128.620.000,00	4 orang	128.620.000,00	APBD
			3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kab. Malinau	49 Item	100.000.000,00	49 Item	100.000.000,00	APBD
			4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kab. Malinau	2 Item	50.000.000,00	2 Item	33.400.000,00	APBD
			5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kab. Malinau	5 item	21.280.000,00	5 item	21.280.000,00	APBD
			6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang	Kab. Malinau	7 item	21.280.000,00	7 item	21.280.000,00	APBD
			7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kab. Malinau	271 org	80.000.000,00	271 org	80.000.000,00	APBD
			8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	20 Kali	400.000.000,00	20 Kali	223.031.460,10	APBD
			9	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Malinau	15 kali	100.000.000,00	15 kali	100.000.000,00	APBD
			10	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan (UPTD PU)	Jumlah pegawai honorer yang dibiayai	Kab. Malinau	40 orang	2.259.840.000,00	40 orang	2.259.840.000,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6			7			
	11	Penyediaan jasa kebersihan kantor (UPTD PU)	Jumlah petugas kebersihan UPTD PU yang dibiayai	Kab. Malinau	4 orang	128.620.000,00	4 orang	128.620.000,00	APBD		
	12	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (UPTD PU)	Jumlah bahan bakar minyak (UPTD PU) yang tersedia	Kab. Malinau	4 item	1.000.000.000,00	4 item	1.000.000.000,00	APBD		
	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD PU)	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab. Malinau	5 kali	50.000.000,00	5 kali	25.000.000,00	APBD		
	14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (UPTD PU)	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Luar Daerah	15 kali	100.000.000,00	15 kali	100.000.000,00	APBD		
	15	Penyediaan Material Kerja UPTD PU	Jumlah material kerja yang tersedia	Kab. Malinau	1 item	247.480.000,00	1 item	134.980.000,00	APBD		
	16	Belanja BBM Alat Berat 4 Kecamatan	Jumlah bahan bakar minyak yang tersedia	Kab. Malinau	4 item	184.640.000,00	4 item	184.640.000,00	APBD		
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	1	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dilakukan	Kab. Malinau	3 Unit	100.000.000,00	3 Unit	100.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6			7
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malinau	3 Unit	70.000.000,00	3 Unit	70.000.000,00	APBD
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (UPTD PU)	Kab. Malinau	25 Unit	300.000.000,00	25 Unit	300.000.000,00	APBD
	4	Pengadaan Peralatan Kantor DPUPR-PERKIM	Kab. Malinau	6 Unit	50.000.000,00	6 Unit	25.000.000,00	APBD
1	1	3	Program pembangunan jalan dan jembatan					
	1	Peningkatan Jalan Swadaya - Simpang Jalan Inhutani	Kec. Malinau Kota	12.20 km	21.363.255.500,00	12.20 km	21.324.920.786,00	APBD
	2	Peningkatan Jalan Long Pujungan - Long Ketaman - Long Jelet No. 251 (DAK PENUGASAN)	Kec. Malinau Kota	1.84 Km	12.497.262.000,00	1.84 Km	12.425.568.000,00	APBD
	3	Peningkatan Jalan Dalam Desa Setulang No. 150 (DAK REGULER)	Kec. Malinau Utara	2.43 Km	9.678.003.000,00	2.43 Km	9.571.221.000,00	APBD
	4	Rehabilitasi Jembatan Singai Terang, pada Ruas Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru No. 243 (DAK REGULER)	Kec. Malinau Barat	1 Unit	4.435.106.000,00	1 Unit	3.571.598.000,00	APBD
	5	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Nanga No. 158 (DAK REGULER)	Kec. Malinau Barat	3.60 Km	14.695.262.000,00	3.60 Km	14.259.402.000,00	APBD
	6	Peningkatan Jalan Damai Kecamatan Malinau Kota	Kec. Mentarang	165 m	1.099.320.000,00	165 m	1.069.326.000,00	APBD
	7	Perencanaan Jembatan Turan Mas Tanjung Lapang	Kec. Malsel	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	-	APBD
	8	Peningkatan Jalan Dalam Desa Kelapis (Ruas Jalan No.160)	Kec. Malsel	500 m	1.499.320.000,00	500 m	1.432.802.000,00	APBD
	9	Penunjang Bidang Jalan (DAK JALAN REGULER)	Kec. Sungai Tubu	10 Bulan	502.382.000,00	10 Bulan	502.382.000,00	APBD
	10	Penunjang Bidang Jalan (DAK JALAN PENUGASAN)	Kec. Kayan Hilir	10 Bulan	85.743.800,00	10 Bulan	85.743.800,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6			7	
	11	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten	Kab. Malinau			1 Dokumen	250.000.000,00	APBD	
1	1	4	Program Pembangunan saluran Drainase / Gorong - gorong						
	1	Normalisasi drainase pusat pemerintahan	Panjang drainase yang dibangun	Kec. Malinau Kota	750 m	8.494.700.000,00	750 m	6.798.569.800,00	APBD
1	1	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						
	1	Pengadaan Kendaraan dan Alat Berat UPTD DPUPR-PERKIM	Jumlah Kendaraan dan alat berat yang tersedia	Kab. Malinau	2 Unit	825.000.000,00		26.440.000,00	APBD
	2	Operasional Pengelolaan Alat Berat UPTD DPUPR-PERKIM di Kec. Kayan Hilir dan Kec. Sungai Boh	Jumlah alat berat yang dikelola	Kec. Kayan Hilir dan Kec. Sungai Boh	2 unit	1.364.919.700,00	2 unit	1.364.919.700,00	APBD
1	1	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
	1	Peningkatan Jaringan Irigasi Pulau Sapi (DAK PENUGASAN)	Luas area irigasi yang ditingkatkan	kec. Mentarang	62 Ha	1.860.000.000,00		-	APBD
	2	Penunjang Peningkatan Jaringan Irigasi Pulau Sapi (DAK IRIGASI PENUKASAN)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	205.540.900,00	10 Bulan	205.540.900,00	APBD
1	1	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum						
	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan dan Pemakaman Umum	Jumlah petugas taman dan pemakaman yang dibiayai	Kab. Malinau	132 Orang	5.250.000.000,00	132 Orang	5.250.000.000,00	APBD
1	1	8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
	1	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Reguler	Jumlah desa yang terlayani PAMSIMAS		3 Desa	700.000.000,00	3 Desa	700.000.000,00	APBD
	2	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) HKP	Jumlah desa yang terlayani PAMSIMAS	Kec. Kayan Hulu	2 Desa	120.000.000,00	2 Desa	120.000.000,00	APBD
	3	Pembangunan Baru Bagi Daerah yang Belum Memiliki Layanan Air Minum (DAK AFIRMASI)	Jumlah SR air minum yang disediakan	Kec. Mentarang, Kec. Malinau	80 SR	1.500.000.000,00		-	DAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6			7	
	4	Perluasan SPAM IKK dan Pengembangan Jaringan Air Minum (DAK PENUGASAN)	Jumlah SR air minum yang disediakan	Kec. Malinau Selatan Hilir, Kec. Malinau	289 SR	1.873.066.000,00	289 SR	1.873.066.000,00	DAK
	5	Penunjang Perluasan SPAM IKK dan Pengembangan Jaringan Air Minum (DAK PENUGASAN)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	248.010.900,00	10 Bulan	248.010.900,00	DAK
	6	Pembangunan Pembangunan Baru Bagi Daerah yang Belum Memiliki Layanan Air Minum (DAK AFIRMASI)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	54.360.900,00	10 Bulan	54.360.900,00	APBD
	7	Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	254.200.000,00	10 Bulan	187.800.000,00	APBD
1	1	9	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						
	1	Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Mentarang	Luas stadion yang dibangun	Kecamatan Malinau Utara	11564 m2	9.683.185.000,00	11564 m2	9.681.190.780,00	APBD
	2	Perencanaan Gedung DPUPR-PERKIM	Jumlah dokumen perencanaan	Kec. Malinau Selatan	1 Dokumen	275.000.000,00			
	3	Pembangunan Panggung Kesenian Pelangi Intimung	Jumlah panggung yang dibangun	Kec. Malinau Selatan Hulu	1 Gedung	8.113.308.800,00	1 Gedung	8.001.869.800,55	APBD
	4	Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK REGULER)	Jumlah rumah yang mendapat bantuan pembangunan RLH	Kec. Malinau Selatan Hulu	35 Unit	1.378.184.000,00		65.684.000,00	
	5	Penambahan Fasilitas Rumah Dinas Jabatan Bupati	Jumlah fasilitas yang disediakan	Kec. Malinau Selatan Hulu	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	APBD
	6	Pembangunan Pagar Pembatas Rumah Dinas Kejaksaan Negeri	Pagar yang dibangun	Kec. Mentarang Hulu	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	APBD
	7	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Jabatan Anggota DPRD	Luas area rumah yang dibangun pagar	Mentarang Hulu	480 m2	648.640.000,00	480 m2	648.640.000,00	APBD
	8	Landscape Arena Pelangi Intimung Tahap II	Luas landscape yang dibangun	Mentarang Hulu	874 m2	4.836.691.200,00	874 m2	4.795.382.500,00	APBD
	9	Pengecatan Halaman Kantor Bupati	Luas halaman yang dicat	Kec. Bahau Hulu		350.000.000,00		350.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6			7		
	10	Pematangan Lahan BPKD Kab. Malinau (Lanjutan)	Luas lahan yang dilakukan pematangan	Kec. Bahau Hulu	3640 m2	500.000.000,00	3640 m2	500.000.000,00	APBD	
	11	Semenisasi jalan menuju Guest House Long Alango	Panjang jalan yang disemenisasi	Kec. Bahau Hulu	75 m	250.000.000,00	-	-		
	12	Penunjang Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK REGULER)	Jangka waktu pelaksanaan	Desa Long Pujungan	10 Bulan	69.520.000,00	10 Bulan	69.520.000,00	APBD	
	13	Rehab Lapangan Bulutangkis Borneo	Luas lapangan yang direhab	Desa Long Pujungan	1 Unit	190.000.000,00	1 Unit	190.000.000,00	APBD	
		Pematangan Lahan Kuburan Kab. Malinau	Volume lahan yang disediakan	Kab. Malinau	0	-	12800 Liter	400.000.000,00	APBD	
1	1	10	Program Pembangunan Sanitasi Permukiman							
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK REGULER)	Jumlah SPALD-T yang dibangun	Kec. Malinau Kota dan Kec. Malinau Utara	4 Unit	2.160.631.000,00	4 Unit	2.160.631.000,00	DAK
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK AFIRMASI)	Jumlah SPALD-T yang dibangun	Kec. Kayan Hulu, Kec.	7 Unit	4.831.179.000,00	7 Unit	4.831.179.000,00	DAK
		1	Penunjang Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK REGULER)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	122.660.900,00	10 Bulan	122.660.900,00	APBD
		2	Penunjang Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK AFIRMASI)	Jangka waktu pelaksanaan		10 Bulan	72.660.900,00	10 Bulan	72.660.900,00	APBD
1	1	11	Program Perencanaan Tata Ruang							
		1	Pemetaan Wilayah Desa dan RT	Jumlah desa yang dipetakan	Kab. Malinau	2 Desa	70.000.000,00	2 Desa	70.000.000,00	APBD
		2	Persetujuan Persub dan Penetapan RTRW Kab. Malinau	Jumlah dokumen yang ditetapkan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	2 Dokumen	250.000.000,00	2 Dokumen	250.000.000,00	APBD
		3	Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang disusun	Kab. Malinau	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	110.469.645,00	APBD
1	1	12	Program Pemanfaatan Ruang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6			7		
	1	Pemutakhiran dan Validasi Peta Wilayah Adat, Hutan Adat dan Hutan Desa Kabupaten Malinau	Jumlah peta yang ditetapkan	Kabupaten Malinau	1 Album Peta	100.000.000,00		17.400.000,00	APBD	
	2	Pelatihan GIS Tingkat Dasar dan Lanjutan	Jumlah peserta diklat	Luar Kabupaten Malinau	8 orang	50.000.000,00		13.200.000,00	APBD	
	3	Pengadaan Bahan dan Material untuk Cetak Peta	Jumlah bahan dan material peta yang disediakan	Kabupaten Malinau	7 Item	30.000.000,00	7 Item	30.000.000,00	APBD	
	4	Pengadaan Mebeller laboratorium GIS dan Perpetaan	Jumlah mebeller yang disediakan	Kabupaten Malinau	5 Item	30.000.000,00	5 Item	30.000.000,00	APBD	
1	1	13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
		1	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi		200 orang	50.000.000,00	200 orang	50.000.000,00	APBD
		2	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TKPRD dan Pokja Penataan Ruang Kabupaten Malinau	Jumlah pertek yang ditetapkan		15 Pertek	50.000.000,00	15 Pertek	50.000.000,00	APBD
1	2	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan							
		1	Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Stan Irau di Lokasi Arena Pelangi Intimung Kabupaten Malinau	Jumlah stan yang dipasang instalasi listrik	Kab. Malinau	120 Stan	500.000.000,00			
		2	Revitalitas PJU Tenaga Surya (PJU TS) Jalan Stadion Kabupaten Malinau	Jumlah PJU TS yang direvitalisasi	Kab. Malinau	50 Tiang	500.000.000,00	50 Tiang	500.000.000,00	APBD
		3	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Malinau	Jumlah LPJU yang dipelihara	Kab. Malinau			100 Unit	200.000.000,00	APBD
1	3	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
		1	Persertifikatan Tanah Aset Pemda Malinau	Jumlah patok beton yang terpasang	Kabupaten Malinau	30 Sertifikat	300.000.000,00	30 Sertifikat	514.840.000,00	APBD
1	3	2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan							
		1	Sosialisasi Bidang Keagrariaan Di Kab. Malinau	Jumlah kecamatan untuk sosialisasi	Kabupaten Malinau	5 Kecamatan	100.000.000,00		60.380.000,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Sebelum Perubahan		Rencana Setelah Perubahan		Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6			7	
1	3	3	Program pengembangan sistem informasi pertanahan						
	1	Pembuatan Sistem Informasi Pertanahan Kabupaten Malinau	Jumlah sistem yang dipasang	Kabupaten Malinau	1 Sistem	100.000.000,00	1 Sistem	100.000.000,00	APBD
TOTAL						131.585.593.000,00		121.669.791.271,65	

Malinau, 07 September 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman



Dr. TOMY, SE., M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. TOMY, S.E, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. YANSEN TP, M.Si
Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 07 September 2020

Pihak Kedua,
Bupati Malinau

Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas PUPR-PERKIM

Dr. TOMY, S.E, M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU

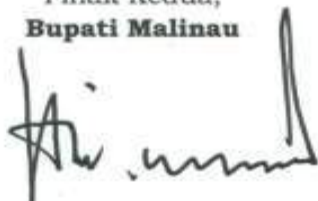
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	22,76 %	22,76 %
2	Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	89,09 %	89,09 %
3	Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	100%	78,31%

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 5.898.479.500,00	Rp 5.567.410.960,10	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 520.000.000,00	Rp 495.000.000,00	APBD
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp 24.800.021.300,00	Rp 11.869.091.164,00	APBD
		Rp 41.305.633.000,00	Rp 39.827.789.000,00	APBD (DAK)
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 8.494.700.000,00	Rp 3.547.135.800,00	APBD
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	APBD
6	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 100.000.000,00	Rp 60.380.000,00	APBD
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00	APBD
8	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp 2.189.919.700,00	Rp 1.391.359.700,00	APBD
10	Program Pengembangan dan	Rp 205.540.900,00	Rp 205.540.900,00	APBD

	Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum	Rp 1.860.000.000,00	Rp 5.250.000.000,00	APBD
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 5.250.000.000,00	Rp 1.310.171.800,00	APBD
		Rp 1.376.571.800,00	Rp 1.873.066.000,00	APBD (DAK)
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 3.373.066.000,00	Rp 13.034.664.905,55	APBD
14	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Rp 25.316.345.000,00	Rp 195.321.800,00	APBD
		Rp 1.378.184.000,00	Rp 6.991.810.000,00	APBD (DAK)
15	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 195.321.800,00	Rp 430.469.645,00	APBD
16	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 6.991.810.000,00	Rp 90.600.000,00	APBD
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 620.000.000,00	Rp 100.000.000,00	APBD
TOTAL		Rp 131.585.593.000,00	Rp 93.139.811.674,65	

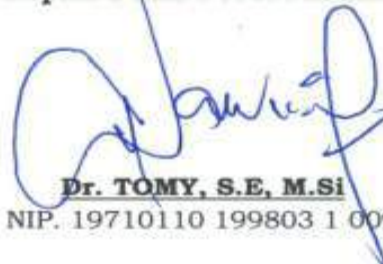
Malinau, 07 September 2020

Pihak Kedua,
Bupati Malinau



Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas PUPR-PERKIM



Dr. TOMY, S.E, M.Si

NIP. 19710110 199803 1 009

Pada triwulan IV terjadi perubahan anggaran yakni dimana nilai anggaran pada beberapa kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sempat mengalami penundaan pembayaran Belanja Modal tersebut dialihkan ke dalam APBD Perubahan sehingga Total Pagu Anggaran pada DPA Revisi berubah menjadi Rp 121.669.791.271,65. Berikut tabel rincian perubahan anggaran tersebut :

Tabel 2.4 Daftar Program dan Anggaran Perubahan TA 2020

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp.)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.567.410.960,10	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	495.000.000,00	APBD
3.	Program pembangunan jalan dan jembatan	64.492.963.586,00	APBD
4.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.798.569.800,00	APBD
5.	Program Penataan Penguasaan, Pemilik, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	514.840.000,00	APBD
6.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	60.380.000,00	APBD
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	700.000.000,00	APBD
8.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	100.000.000,00	APBD
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.391.359.700,00	APBD
10.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	205.540.900,00	APBD
11.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Umum	5.250.000.000,00	APBD
12.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.183.237.800,00	APBD
13.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	25.102.287.080,55	APBD
14.	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	7.187.131.800,00	APBD
15.	Program Perencanaan Tata Ruang	430.469.645,00	APBD
16.	Program Pemanfaatan Ruang	90.600.000,00	APBD
17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:

- (1) IKU spesifik dan jelas (Spesific)
- (2) IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)
- (3) IKU dapat dicapai (Achievabel)
- (4) IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound)
- (5) IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)

Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu

gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.

Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir Tahun 2020, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	22,76%	49,7%	218%
2.	Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	89,09%	89,09%	100%
3.	Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	78,31%	78,31%	100%

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja antara lain :

A. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan”

Tabel 3.2. Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Panjang jalan mantap}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	REALISASI	DEVIASI	CAPAIAN
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	22,76%	49,7%	26,9	218%

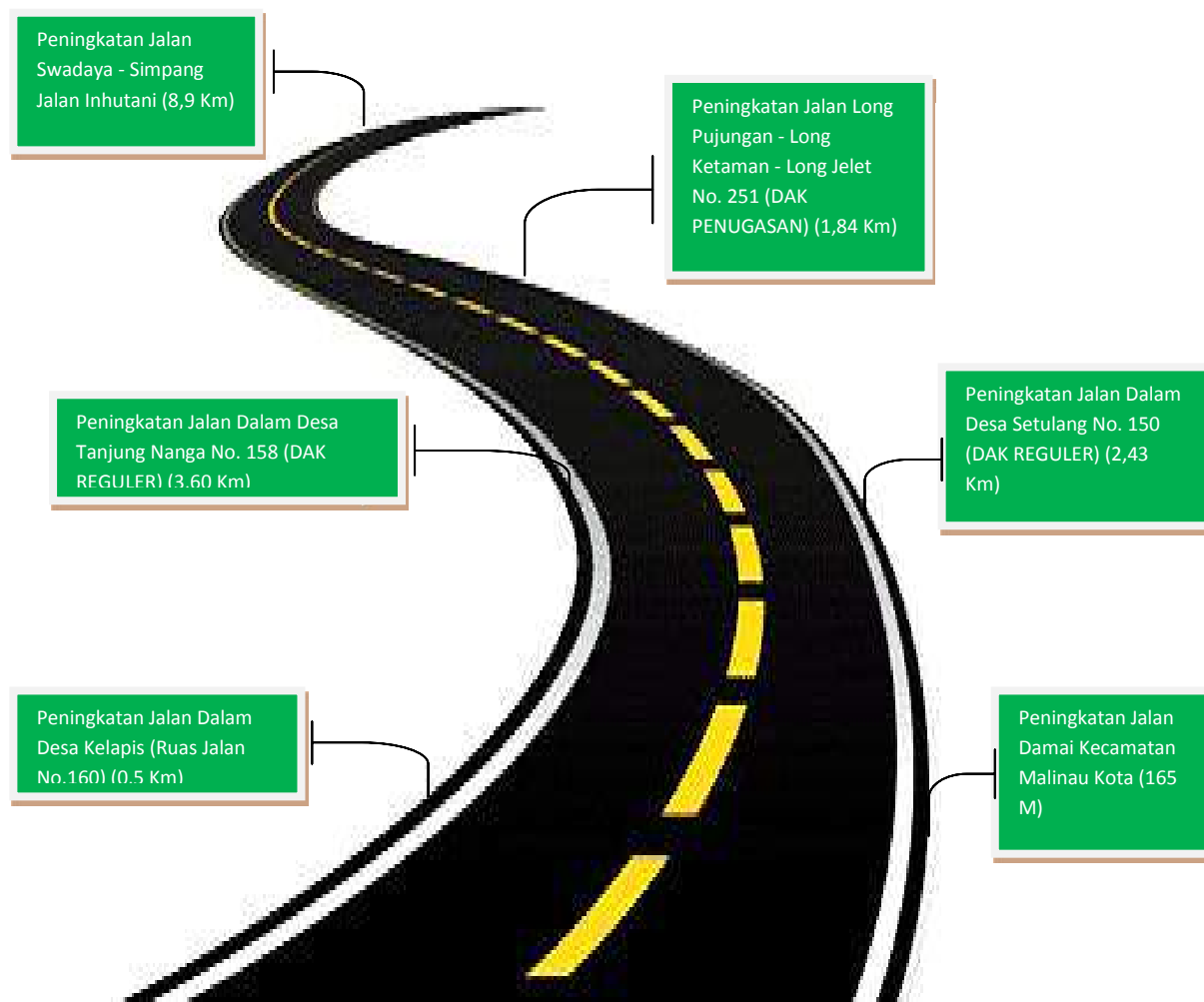
Berdasarkan dokumen RENSTRA Tahun 2016-2021, target indikator kinerja “persentase jalan dalam kondisi baik/mantap” pada tahun 2020 adalah **22,76%**. Pada tahun 2020 persentase jalan dalam kondisi baik/mantap yang dicapai oleh DPU-PR.PERKIM senilai **49,7%** dengan kinerja yang dicapai sebesar **218%** dari target dimana terdapat deviasi **lebih** sebesar **26,9**.

Dalam hal ini, kondisi kemantapan jalan merupakan salah satu faktor penting untuk memperlancar pergerakan kendaraan. Kondisi jalan yang buruk (tidak mantap) mengakibatkan kendaraan tidak dapat mencapai kecepatan optimal sehingga waktu tempuh dan biaya operasi kendaraan bertambah. Pencapaian tingkat kemantapan jalan akan mendukung upaya menekan biaya logistik daerah.

Acuan yang digunakan untuk mengukur kemantapan jalan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 Tanggal 3 Oktober 2011, Pasal 1 Butir 14 dan Lampiran – Kriteria Teknis Pemeliharaan Jalan butir 2 Tabel Penentuan Kondisi Ruas Jalan (B, S, RR, RB) Berdasarkan Nilai RCI atau IRI vs Lalu Lintas (LHRT).

Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Konsep Kemantapan Jalan Daerah adalah pelayanan (performance), dimana pengguna jalan bisa merasakan nyaman, aman dan dapat memanfaatkan kecepatan secara optimum sehingga jalan dapat berfungsi secara fungsional.

Untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah, Dinas PU-PR.PERKIM Kabupaten Malinau perlu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan serta preservasi jalan pada ruas – ruas jalan daerah. Melalui “Program pembangunan jalan dan jembatan”, Kegiatan preservasi jalan terdiri atas pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan preventif jalan, pemeliharaan rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan dan pelebaran jalan menuju standar dapat terlaksana pada Tahun 2020 sebagai berikut:

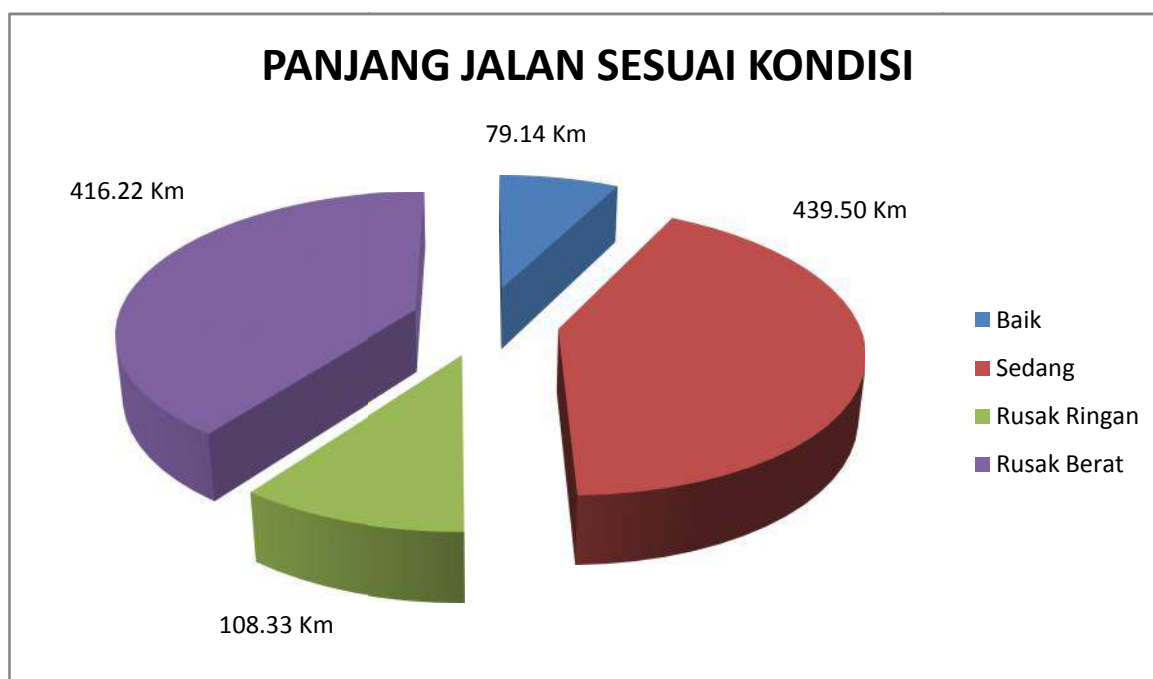


Gambar 3.1 Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2020

Pelaksanaan 6 kegiatan peningkatan jalan tersebut telah meningkatkan kondisi jalan mantap sepanjang 17,30 Km atau sekitar 0,75%. Untuk perhitungan kondisi kemantapan jalan ini dilakukan secara kumulatif dari kondisi jalan pada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian setelah dilakukan penyelarasan dengan *outcome* pada Tahun 2020 maka rincian kondisi jalan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Kondisi Jalan Kabupaten Malinau Tahun 2020

No.	URAIAN	KONDISI JALAN 2020	
		Km	%
I	Mantap		49.7
	a. Baik	79.14	7.6
	b. Sedang	439.50	42.1
II	Tidak Mantap		50.3
	a. Rusak Ringan	108.33	10.4
	b. Rusak Berat	416.22	39.9



Gambar 3.2 Panjang Jalan Sesuai Kondisi Tahun 2020

Tabel 3.5. Perbandingan Kinerja Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	49,83 %	20,69 %	49,68 %	22,76 %	49,7 %

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan data perbandingan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemantapan jalan meningkat 0,75% dari tahun lalu, hal ini terjadi karena dilakukan beberapa upaya percepatan mulai dari pemrograman hingga pelaksanaan, meliputi :

- ❖ Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik reguler maupun penugasan
- ❖ Penyiapan dokumen *readiness criteria* (dokumen perencanaan teknis, DED, RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya
- ❖ Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
- ❖ Dukungan penggunaan Sistem SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) yang dapat membantu POKJA dalam pelaksanaan proses pelelangan
- ❖ Dukungan sistem *eMonitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progres pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- ❖ Kerjasama & koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya

membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

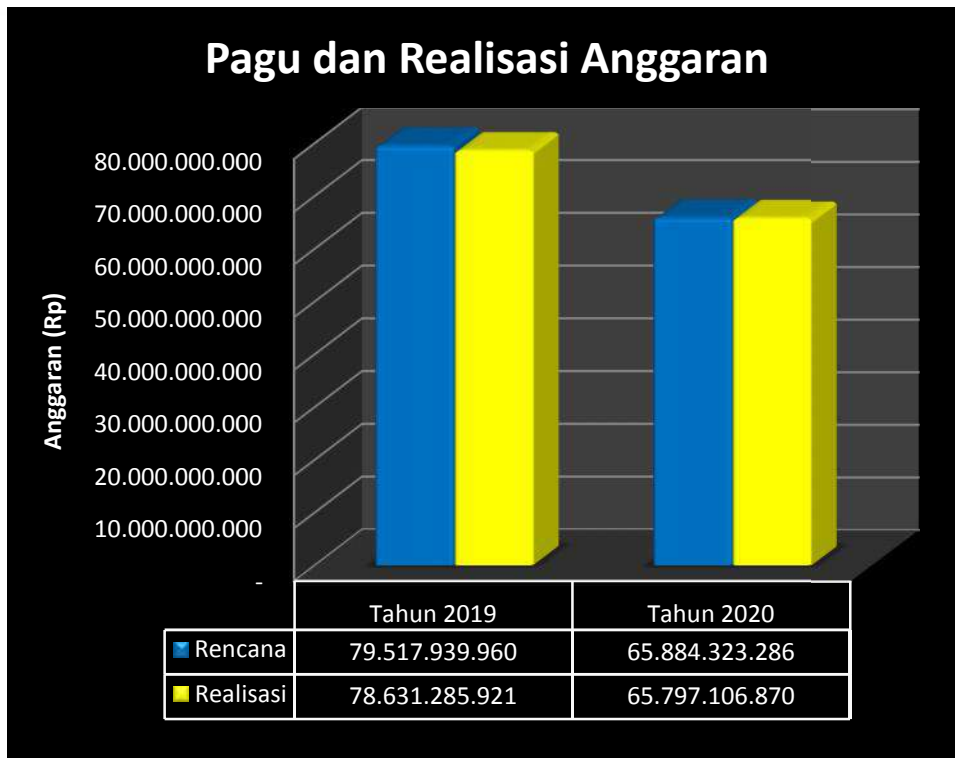
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	218	<p>Program pembangunan jalan dan jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peningkatan Jalan Swadaya - Simpang Jalan Inhutani (8927 M) 2. Kegiatan Peningkatan Jalan Long Pujungan - Long Ketaman - Long Jelet No. 251 (DAK PENUGASAN) (1,84 Km) 3. Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Desa Setulang No. 150 (DAK REGULER) (2,43 Km) 4. Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Nanga No. 158 (DAK REGULER) (3,6 Km) 5. Kegiatan Peningkatan Jalan Damai Kecamatan Malinau Kota (165 M) 6. Kegiatan 	97,55

			Peningkatan Jalan Dalam Desa Kelapis (Ruas Jalan No.160) (500 M) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dan alat berat UPTD DPU-PR.PERKIM 2. Operasional pengelolaan alat berat UPTD DPU-PR.PERKIM di Kec. Kayan Hilir dan Kec. Sungai Boh	97,77
--	--	--	--	-------

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

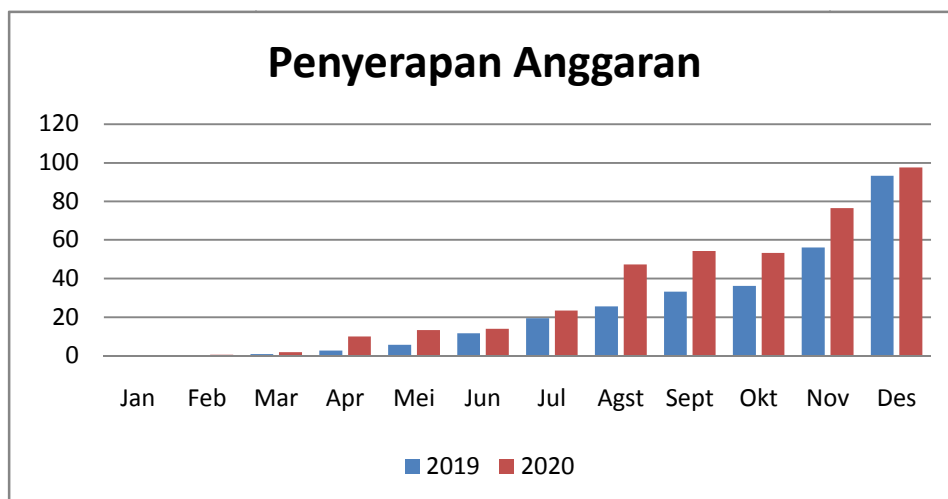
Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran



Gambar 3.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya penghematan yakni dari Rp 79.517.939.960 menjadi Rp 65.884.323.286 atau sekitar 17%. Meskipun demikian, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 yakni 99,86% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 98,88%.

Gambar 3.4 Perbandingan Penyerapan Anggaran Per-Bulan



Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2020, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Disamping itu penetapan APBD Perubahan yang baru selesai pada triwulan empat yakni tepatnya dibulan Oktober dengan nomenklatur yang baru dan diikuti dengan proses administrasi lanjutan (penetapan SDM pelaksana) telah berimplikasi pada keterlambatan penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2020. Rata-rata penyerapan per bulan pada tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata penyerapan tahun 2019.

Berikut dokumentasi hasil capaian kinerja dari beberapa kegiatan peningkatan jalan pada tahun 2020 yang telah terlaksana:



Peningkatan Jalan Long Pujungan - Long Ketaman - Long Jelet No. 251 (DAK PENUGASAN)



Peningkatan Jalan Dalam
Desa Kelapis (Ruas Jalan
No.160)



B. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perdesaan”

Tabel 3.7 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Jumlah Jembatan mantap}}{\text{Total jumlah jembatan}} \times 100\%$

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	REALISASI	DEVIASI	CAPAIAN
1.	Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	89,09 %	89,09 %	0	100 %

Sesuai dengan dokumen RENSTRA 2016 – 2021, Target indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap” ditahun 2020 adalah **89,09 %**. Pada tahun 2020 “persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap” yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai **89,09 %** dengan nilai deviasi sebesar **0** dan tingkat capaian kinerja **100 %**.

Jembatan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jembatan tersebut dalam kondisi Baik dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jembatan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Konsep Kemantapan jembatan Daerah adalah pelayanan (performance), dimana dengan jembatan berkondisi baik/mantap maka pengguna jalan tetap bisa mengakses ruas-ruas jalan yang lain dan tetap merasakan nyaman dan aman sehingga infrastruktur dapat berfungsi secara fungsional.

Untuk meningkatkan kemantapan jembatan daerah, Dinas PU-PR.PERKIM perlu melaksanakan preservasi jembatan pada ruas – ruas jalan daerah. Kegiatan preservasi jembatan terdiri atas pemeliharaan rutin jembatan, pemeliharaan preventif jembatan, pemeliharaan rehabilitasi jembatan menuju standar.

Pada Tahun 2020 peningkatkan kemantapan jembatan daerah didukung oleh “Program Pembangunan Jalan dan Jembatan” melalui kegiatan Rehabilitasi Jembatan Singai Terang, pada Ruas Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru No. 243 (DAK REGULER) dengan target *output* 1 Unit (120 M) dimana sumber pendanaan dari Pusat (APBN) yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperbaiki kondisi oprit Jembatan Pelangi II (Singai Terang) dikarenakan tingginya elevasi oprit dan rawan terhadap kelongsoran yang dapat berpotensi mengakibatkan terputusnya akses penghubung jalan ke struktur jembatan. Selain itu, proteksi timbunan oprit ini juga bertujuan agar konstruksi Jembatan Pelangi II (Singai Terang) menjadi kokoh dan fungsional yang menghubungkan ruas Jalan Provinsi – ruan Jalan Mentarang Baru – Singai Terang – Pulau Sapi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

- a. Pekerjaan galian dan timbunan yaitu pelaksanaan pekerjaan tanah untuk menyempurnakan elevasi dan kemiringan *sloot* oprit jembatan ± 125 M'
- b. Pekerjaan struktur beton bertulang yaitu untuk penanganan konstruksi pondasi dasar dan *wing wall* oprit jembatan yakni rencana panjang pondasi 94 M', *wing wall* 24 M' dengan tinggi 12 M'
- c. Pekerjaan bronjong (*gabions rock*) yaitu konstruksi pasangan batu kosong yang diisi dalam ikatan kawat *galvanized gabions rock* 4 mm, rencana panjang penanganan sepanjang oprit jembatan ± 80 M' dengan ketinggian rata-rata 12 M' di sisi kanan jembatan dan sepanjang 24 M' di sisi kiri jembatan

Dalam hal pelaksanaan, kegiatan telah berjalan lancar dan sesuai dengan rencana kegiatan serta tidak memiliki kendala yang berarti. Untuk perhitungan kondisi kemantapan jembatan ini dilakukan secara kumulatif dari kondisi jembatan pada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian setelah dilakukan penyesuaian dengan *outcome* pada Tahun 2020 maka rincian kondisi jembatan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Kondisi Jembatan Tahun 2020

No	KONDISI JEMBATAN 2020	JUMLAH (UNIT)
I	Mantap (Baik)	49
II	Tidak Mantap	6
	a. Rusak Ringan	4
	b. Rusak Berat	2
	TOTAL	55

Berikut dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jembatan Singai Terang, pada Ruas Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru No. 243 (DAK REGULER) dengan target *output* 1 Unit (120 M).





C. Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih”

Kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator “persentase rumah tangga yang terlayani air bersih”, berikut rumusan indikator tersebut beserta hasil capaian kinerja pada tahun 2020 :

Tabel 3.10 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih pada tahun (2020)}}{\text{Jumlah target rumah tangga pada tahun (2020)}} \times 100\%$

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	REALISASI	DEVIASI	CAPAIAN
1.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	100%	78,31%	-21	78,31%

Pada tahun 2020, dari target **100%** telah terealisasi sebanyak **78,31%** atau **289 SR** yang setara dengan **289** rumah tangga yang terlayani air bersih. Angka **78,31%** ini merupakan total realisasi dari target Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun.

Capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami deviasi **kurang** sebesar **21%**. Hal ini terjadi dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai dampak dari Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 silam, sebagaimana telah dinyatakan oleh Kementerian Keuangan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor : S-247/MK.07/2020 Tentang : Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020. Terkait Kegiatan DAK Air Minum yang belum dilakukan proses pelelangan maka kegiatan tersebut dihentikan sehingga mengurangi capaian kinerja yang sudah direncanakan yakni 100% dengan target *output* 369 SR berkurang menjadi 289 SR.

Pelaksanaan kinerja sasaran ini, didukung oleh “Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah” melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan (DAK Penugasan) di beberapa Desa Kabupaten Malinau. Berikut pelaksanaan output-output yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di beberapa Desa Kecamatan Sungai Boh dalam meningkatkan pelayanan air bersih di tahun 2020, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.6

Perluasan SPAM -
Pengembangan Jaringan
Perpipaan di Kecamatan
Sungai Boh Tahun 2020



Desa
Mahak
Baru 75
SR

Desa
Dumu
Mahak 49
SR

Desa
Data
Baru 49
SR

Desa
Long
Lebusan
69 SR

Desa
Agung
Baru 47
SR

TABEL DATA AIR BERSIH

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR) YANG TERPENUHI			
			2018	2019		2020
				SPAM	IPA	
1	MENTARANG	Long Gafid				0
		Long Bisai				0
		Temalang				0
		Long Liku				0
		Pulau Sapi				0
		Paking		55	27	82
		Lidung Keminci				0
		Mentarang Baru	50			50
		Harapan Maju		76	9	85
2	MALINAU KOTA	Batu Lidung				0
		Malinau Kota	50			50
		Pelita Kanaan				0
		Malinau Hulu				0
		Malinau Hilir				0
		Tanjung Keranjang				0
					0	
3	PUJUNGAN	Long Pujungan		300		300
		Long Ketaman				0
		Long Pua				0
		Long Lame				0
		Long Jelet				0
		Long Aran				0
		Long Paliran				0
		Long Bena				0
		Long Belaka Pitau				0
					0	
4	KAYAN HILIR	Data Dian				0
		Long Pipa				0
		Long Sule		300		300
		Sungai Anai				0
		Long Metun				0
					0	
5	KAYAN HULU	Long Nawang	50			50
		Nawang Baru	50			50
		Long Temuyat	50			50
		Long Betaoh				0
		Long Payau				0
					0	
		Bila Bekayuk				0

6	MALINAU SELATAN	Long Loreh				0
		Langap				0
		Laban Nyarit				0
		Nunuk Tanah Kibang	22	60		82
		Pelencau	25	57		82
		Paya Seturan				0
		Punan Rian		62		62
		Sengayan				0
					0	
7	MALINAU UTARA	Kaliyamok				0
		Luso				0
		Malinau Seberang				0
		Putat				0
		Salap				0
		Seruyung				0
		Respen Tubu				0
		Belayan				0
		Sembuak Warod				0
		Lubak Manis				0
		Semenggaris				0
		Tanjung Lima	50			50
						0
						0
8	MALINAU BARAT	Long Bila				0
		Long Kenipe				0
		Punan Bengalun				0
		Sesua				0
		Sentaban				0
		Tanjung Keranjang				0
		Taras	50			50
		Kuala Lapang				0
				0		
9	SUNGAI BOH	Dumu Mahak			49	49
		Long Lebusan			69	69
		Mahak Baru			84	84
		Long Top				0
		Agung Baru			47	47
		Data Baru			49	49
				0		
10	KAYAN SELATAN	Long Ampung				0
		Long Uro				0
		Lidung Payau				0
		Sungai Barang				0
		Metulang				0
				0		
11	BAMAI UHII	Long Uli				0
		Long Alango	300	50		350
		Long Berini				0

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	78,31	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Reguler (3 Desa) 2. Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) HKP (2 Desa) 3. Kegiatan Perluasan SPAM IKK dan Pengembangan Jaringan Air 	81,42

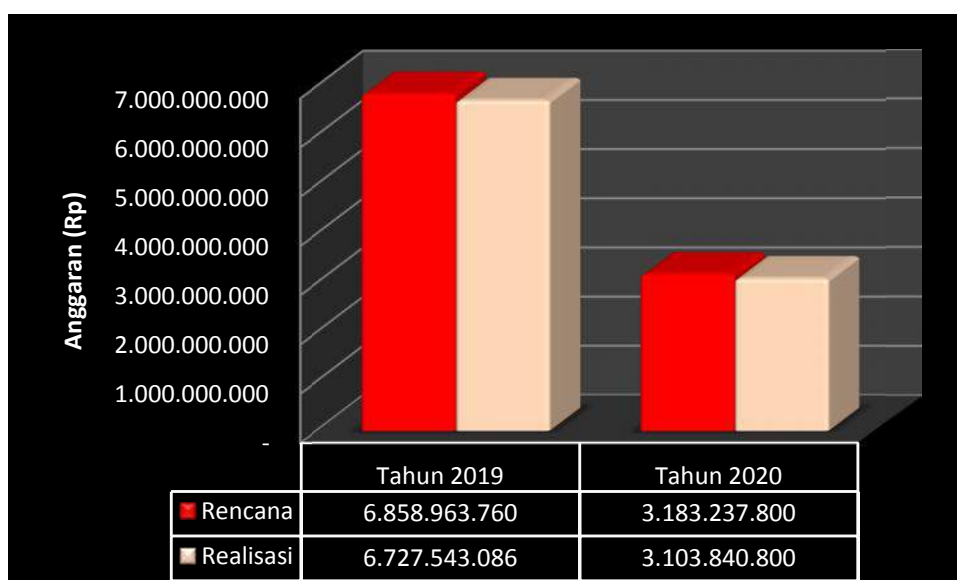
			<p>Minum (DAK PENUGASAN)(5 Desa)</p> <p>4. Kegiatan Pembangunan SPAM JP (DAK AFIRMASI) (1 Desa)</p> <p>5. Kegiatan Penunjang Perluasan SPAM IKK dan Pengembangan Jaringan Air Minum (DAK PENUGASAN)</p> <p>6. Kegiatan Penunjang Pembangunan SPAM JP (DAK AFIRMASI)</p> <p>7. Kegiatan Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat</p>	
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih mencapai angka 78,31% dengan rata-rata realisasi keuangan 81,42%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui kegiatan Perluasan SPAM dan PAMSIMAS. Adapun kegiatan Pembangunan SPAM JP merupakan kegiatan yang gagal lelang sebagaimana telah dijelaskan di atas sebagai dampak dari Covid-19 sehingga mengurangi capaian kinerja dari target yang sudah ditentukan.

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran



Gambar 3.5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa rencana pagu anggaran pada Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya penghematan yakni dari Rp 6.858.963.760 menjadi Rp 3.183.237.800 atau sekitar 53,60%.

Berbanding lurus dengan penurunan pagu anggaran, progres realisasi anggaran Dinas PUPR-PERKIM juga mengalami penurunan yaitu dari 98,08 menjadi 97,50%.



Gambar 3.6 Perbandingan Penyerapan Anggaran

Adapun dalam hal penyerapan anggaran, terdapat beberapa hambatan pada semester pertama di tahun 2020, dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Penyerapan anggaran efektif per bulan yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai Desember 2020, dengan persentase progres yang masih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran untuk indikator air bersih masih kurang efektif.

Pelaksanaan kegiatan Perluasan SPAM - Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Sungai Boh Tahun 2020 pada 5 Desa tersebut telah meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih sebesar 289 KK. Untuk perhitungan jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih ini dilakukan secara satuan yakni hanya berdasarkan tahun anggaran pelaksanaan. Dengan demikian rincian perhitungan peningkatan akses air bersih Kabupaten Malinau pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum Tahun 2020

No	Output	L/detik	Sambungan Rumah*	Jiwa Terlayani**	Proyeksi Penduduk (2019)***
1.	Pengembangan Jaringan Perpipaan	3	289	1.445	90.382

Keterangan :

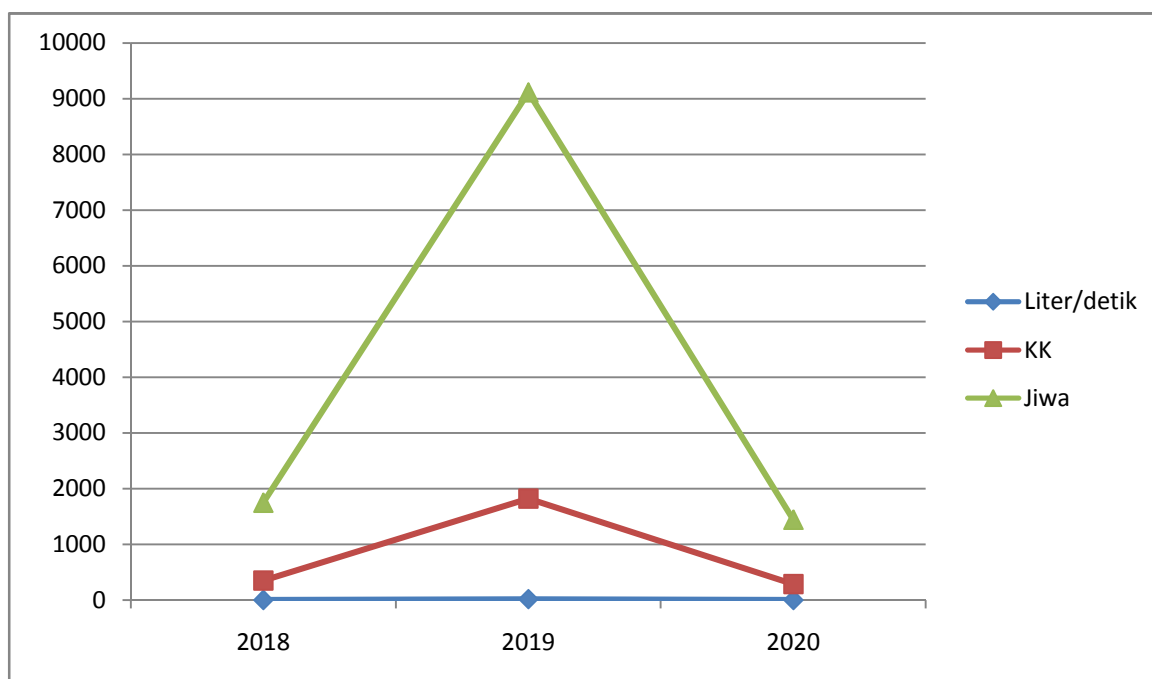
*Asumsi 1 L/detik setara dengan 100 SR

**Asumsi 1 KK = 5 Jiwa

***Data BPS Proyeksi Penduduk dan Rumah Tangga Kabupaten Malinau Juni 2010 - Juni 2020

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Air Bersih Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	350 SR	1.822 SR	1.822 SR	369 SR	289



Gambar 3.7 Diagram Perbandingan Layanan Air Bersih Tahun 2018 -2020

Perbandingan target dan realisasi antara tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber air baku pada daerah pelayanan dan masih adanya kapasitas produksi (idle capacity) pada sistem eksisting. Selain itu sumber pendanaan dalam meningkatkan kinerja ini sebagian besar masih bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Walaupun ada penurunan target dan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih. Berikut beberapa dokumentasi hasil pelaksanaan

Perluasan SPAM - Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Sungai Boh Tahun 2020 :



3.4 REALISASI ANGGARAN

Salah satu sumber daya dari suatu organisasi adalah sumber daya keuangan. Pada tahun 2020, seperti yang dijelaskan pada BAB II, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mendapatkan total alokasi dana pada DPA Awal Rp 131.585.593.000,00, kemudian setelah adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai dampak dari Covid-19 maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan perubahan strategi yakni dengan melakukan penundaan pembayaran Belanja Modal pada beberapa kegiatan yang bersifat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga total Pagu Rasionalisasi berjumlah senilai Rp 93.139.811.674,65.

Pada triwulan IV terjadi perubahan anggaran yakni dimana nilai anggaran pada beberapa kegiatan KDP yang sempat mengalami penundaan pembayaran Belanja Modal tersebut dialihkan ke dalam APBD Perubahan sehingga Total Pagu Anggaran pada DPA Revisi berubah menjadi Rp 121.669.791.271,65, dengan realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp 121.330.992.218,00 dengan progres 99,72%. Untuk alokasi anggaran per sasaran strategis PD telah dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Ke - 1

Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan Baik di Perkotaan Maupun Perdesaan” . Pada Tahun 2020, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 60.921.365.586,00 dan realisasi anggaran Rp 60.860.637.517,00 dengan progres senilai 99,90%.

Sasaran Strategis Ke - 2

Sasaran strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jembatan Baik di Perkotaan Maupun Perdesaan”. Pada Tahun 2020, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 3.571.598.000,00 dan realisasi anggaran Rp 3.570.483.000,00 dengan progres senilai 99,97%.

Sasaran Strategis Ke – 3

Sasaran strategis “Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih “. Pada Tahun 2020, alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA Revisi yaitu sebesar Rp 3.183.237.800,00 dan realisasi anggaran Rp 3.103.840.800,00 dengan progres senilai 97,51%.

Alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2020

sebesar Rp. 132.051.333.722,25 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.111.140.450,60 dan belanja langsung sebesar Rp. 121.940.193.271,6

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	132.051.333.722,25	131.217.078.325,00	99,36
1	Belanja Tidak Langsung	10.111.140.450,60	9.904.426.107,00	97,95
2	Belanja Langsung	121.940.193.271,65	121.312.652.218,00	99,49

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar 132.051.333.722,25 yang telah terealisasi sebesar Rp. 131.217.078.325,00 atau tercapai 99,36% terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Struktur belanja untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih besar untuk alokasi Belanja Langsung yaitu sebesar 92,34% sedangkan Belanja Tidak Langsung mendapat alokasi 7,65%.

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Belanja Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA LANGSUNG	121.940.193.271,65	121.312.652.218,00	99,49
1	Belanja Pegawai	9.080.503.600,00	8.945.051.200,00	98,50
2	Belanja Barang dan Jasa	18.056.953.205,10	17.677.592.426,00	97,89
3	Belanja Modal	94.802.736.466,55	94.690.008.592,00	99,88

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Realisasi anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 121.312.652.218,00 atau 99,49% dari target anggaran sebesar Rp. 121.940.193.271,65. Anggaran Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Alokasi terbesar adalah Belanja Modal sebesar 77,76%, selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi sebesar 14,80% dan terakhir alokasi Belanja Pegawai sebesar 7,44%.

Untuk melihat rincian progres keuangan secara keseluruhan, dapat dilihat pada lampiran rekapitulasi progres keuangan tahun 2020 per Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas PU-PR.PERKIM berdasarkan data Simda per 31 Desember 2020.

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas PU.PR-PERKIM dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan daerah secara komprehensif. Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2020.

Pencapaian terhadap sasaran strategis yang dapat melebihi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis DPU-PR.PERKIM 2016 - 2021 telah dapat menggambarkan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi perencanaan kegiatan.
2. Meningkatkan persiapan proses pelelangan
3. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
4. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.
5. Meningkatkan penyediaan air bersih dan air minum

LAMPIRAN



REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN BULAN : DESEMBER 2020

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.567.410.960,10				5.700.163.532,00			-132.752.571,90
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Malinau	1.026.719.500,00	0,84	100,00	0,84	1.002.220.000,00	97,61	0,82	24.499.500,00
	Belanja Pegawai		1.026.420.000,00	0,84	99,97	0,84	122.620.000,00	11,95	0,10	903.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		299.500,00	0,00	0,03	0,00	879.600.000,00	293.689,48	0,72	(879.300.500,00)
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Malinau	128.620.000,00	0,11	100,00	0,11	128.520.000,00	99,92	0,11	100.000,00
	Belanja Pegawai		128.520.000,00	0,11	99,92	0,11	128.520.000,00	100,00	0,11	-
	Belanja Barang dan Jasa		100.000,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Malinau	100.000.000,00	0,08	100,00	0,08	99.474.800,00	99,47	0,08	525.200,00
	Belanja Pegawai		16.380.000,00	0,01	16,38	0,00	16.380.000,00	100,00	0,01	-
	Belanja Barang dan Jasa		83.620.000,00	0,07	83,62	0,06	83.094.800,00	99,37	0,07	525.200,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	33.400.000,00	0,03	100,00	0,03	33.400.000,00	100,00	0,03	0,00
	Belanja Pegawai		16.800.000,00	0,01	50,30	0,01	16.800.000,00	100,00	0,01	-
	Belanja Barang dan Jasa		16.600.000,00	0,01	49,70	0,01	16.600.000,00	100,00	0,01	-
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Malinau	21.280.000,00	0,02	100,00	0,02	21.233.500,00	99,78	0,02	46.500,00

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPTD PU)	Kab. Malinau	128.620.000,00	0,11	100,00	0,11	128.520.000,00	99,92	0,11	100.000,00
	Belanja Pegawai		128.520.000,00	0,11	99,92	0,11	128.520.000,00	100,00	0,11	-
	Belanja Barang dan Jasa		100.000,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (UPTD PU)	Kab. Malinau	1.000.000.000,00	0,82	100,00	0,82	990.467.000,00	99,05	0,81	9.533.000,00
	Belanja Pegawai		37.150.000,00	0,03	3,72	0,00	35.300.000,00	95,02	0,03	1.850.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		962.850.000,00	0,79	96,29	0,76	955.167.000,00	99,20	0,79	7.683.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD PU)	Luar Daerah	25.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (UPTD PU)	Dalam Daerah	100.000.000,00	0,08	98,61	0,08	98.608.800,00	98,61	0,08	1.391.200,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		100.000.000,00	0,08	98,61	0,08	98.608.800,00	98,61	0,08	1.391.200,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Penyediaan Material Kerja UPTD PU	Kab. Malinau	334.982.000,00	0,28	100,00	0,28	328.173.075,00	97,97	0,27	-193.193.075,00
	Belanja Pegawai		22.480.000,00	0,02	6,71	0,00	17.260.000,00	76,78	0,01	5.220.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		112.500.000,00	0,09	93,29	0,09	310.913.075,00	276,37	0,26	(198.413.075,00)
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Belanja BBM Alat Berat 4 Kecamatan	Kec. Mentarang Hulu, Kec. Bahau	184.640.000,00	0,15	100,00	0,15	182.453.900,00	98,82	0,15	2.186.100,00
	Belanja Pegawai		15.332.400,00	0,01	8,30	0,00	14.760.000,00	96,27	0,01	572.400,00

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
	Belanja Modal		21.324.920.786,00	17,53	100,00	17,53	21.324.495.860,00	100,00	17,53	424.926,00
22	Peningkatan Jalan Long Pujungan - Long Ketaman - Long Jelet No. 251 (DAK PENUGASAN)	Kecamatan Pujungan	12.425.568.000,00	10,21	100,00	10,21	12.425.567.948,00	100,00	10,21	52,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		12.425.568.000,00	10,21	100,00	10,21	12.425.567.948,00	100,00	10,21	52,00
23	Peningkatan Jalan Dalam Desa Setulang No. 150 (DAK REGULER)	Kecamatan Malinau Selatan	9.571.221.000,00	7,87	100,00	7,87	9.571.010.950,00	100,00	7,87	210.050,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		9.571.221.000,00	7,87	100,00	7,87	9.571.010.950,00	100,00	7,87	210.050,00
24	Rehabilitasi Jembatan Singai Terang, pada Ruas Jalan Jembatan Singai Terang Menuju Desa Mentarang Baru	Kecamatan Mentarang	3.571.598.000,00	2,94	100,00	2,94	3.570.483.000,00	99,97	2,93	1.115.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		3.571.598.000,00	2,94	100,00	2,94	3.570.483.000,00	99,97	2,93	1.115.000,00
25	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Nanga No. 158 (DAK REGULER)	Kecamatan Malinau Selatan	14.259.402.000,00	11,72	99,99	11,72	14.257.854.000,00	99,99	11,72	1.548.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		14.259.402.000,00	11,72	99,99	11,72	14.257.854.000,00	99,99	11,72	1.548.000,00
26	Peningkatan Jalan Damai Kecamatan Malinau Kota	Kec.Malinau Kota	1.069.326.000,00	0,88	99,99	0,88	1.068.362.000,00	99,91	0,88	964.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		1.069.326.000,00	0,88	99,99	0,88	1.068.362.000,00	99,91	0,88	964.000,00
27	Peningkatan Jalan Dalam Desa Kelapis (Ruas Jalan No.160)	Kec.Malinau Utara	1.432.802.000,00	1,18	100,00	1,18	1.431.541.000,00	99,91	1,18	1.261.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		1.432.802.000,00	1,18	100,00	1,18	1.431.541.000,00	99,91	1,18	1.261.000,00

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
	Belanja Barang dan Jasa		54.360.900,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.360.900,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46	Penunjang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Kab. Malinau	187.800.000,00	0,15	94,11	0,15	176.743.200,00	94,11	0,15	11.056.800,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		187.800.000,00	0,15	94,11	0,15	176.743.200,00	94,11	0,15	11.056.800,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		25.102.287.080,55				24.601.160.675,00			90.922.405,55
47	Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Mentarang	Kec. Mentarang	9.681.190.780,00	7,96	99,98	7,95	9.666.734.575,00	99,85	7,95	14.456.205,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.666.734.575,00)
	Belanja Modal		9.681.190.780,00	7,96	99,98	7,95	9.666.734.575,00	99,85	7,95	9.681.190.780,00
48	Pembangunan Panggung Kesenian Pelangi Intimung	Pemerintahan	8.001.869.800,55	6,58	99,98	6,58	8.000.030.000,00	99,98	6,58	1.839.800,55
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		8.001.869.800,55	6,58	99,98	6,58	8.000.030.000,00	99,98	6,58	1.839.800,55
49	Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk	Desa Respen Tubu, dan Desa	65.684.000,00	0,05		0,00	55.480.000,00		0,05	10.204.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		65.684.000,00	0,05	8,48	0,00	55.480.000,00	84,47	0,05	10.204.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	Penambahan Fasilitas Rumah Dinas Jabatan Bupati	Kec. Malinau Kota	200.000.000,00	0,16	99,96	0,16	194.054.500,00	97,03	0,16	5.945.500,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		200.000.000,00	0,16	99,96	0,16	194.054.500,00	97,03	0,16	5.945.500,00
51	Pembangunan Pagar Pembatas Rumah Dinas Kejaksaan Negeri	Kab. Malinau	200.000.000,00	0,16	100,00	0,16	196.553.000,00	98,28	0,16	3.447.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		200.000.000,00	0,16	100,00	0,16	196.553.000,00	98,28	0,16	3.447.000,00

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
	Program Perencanaan Tata Ruang		430.469.645,00				414.585.442,00			11.384.203,00
63	Pemetaan Wilayah Desa dan RT	Wilayah Perkotaan	70.000.000,00	0,06	91,28	0,05	68.765.489,00	98,24	0,06	1.234.511,00
	Belanja Pegawai		11.960.000,00	0,01	9,94	0,00	11.960.000,00	100,00	0,01	-
	Belanja Barang dan Jasa		58.040.000,00	0,05	81,34	0,04	56.805.489,00	97,87	0,05	1.234.511,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
64	Persetujuan Persub dan Penetapan RTRW Kab. Malinau	Kab. Malinau	245.500.000,00	0,20	86,68		241.990.308,00	98,57	0,20	3.509.692,00
	Belanja Pegawai		108.080.000,00	0,09	31,71	0,03	100.080.000,00	92,60	0,08	8.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		137.420.000,00	0,11	54,97	0,06	137.410.308,00	99,99	0,11	9.692,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
65	Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Malinau	Kab. Malinau	110.469.645,00	0,09	100,00	0,09	103.829.645,00	93,99	0,09	6.640.000,00
	Belanja Pegawai		24.300.000,00	0,02	22,00	0,00	17.660.000,00	72,67	0,01	6.640.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		75.889.645,00	0,06	68,70	0,04	75.889.645,00	100,00	0,06	-
	Belanja Modal		10.280.000,00	0,01	9,31	0,00	10.280.000,00	0,00	0,00	-
	Program Pemanfaatan Ruang		90.600.000,00				59.242.000,00			31.358.000,00
66	Pemutakhiran dan Validasi Peta Wilayah Adat, Hutan Adat dan Hutan Desa Kabupaten Malinau	Pemuktahiran dan Validasi Peta	17.400.000,00	0,01	0,00		0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
	Belanja Pegawai		17.400.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
67	Pelatihan GIS Tingkat Dasar dan Lanjutan	Dalam dan luar daerah	13.200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Belanja Pegawai		13.200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68	Pengadaan Bahan dan Material untuk Cetak Peta	kabupaten Malinau	30.000.000,00	0,02	7,50	0,00	29.545.000,00	98,48	0,02	455.000,00
	Belanja Pegawai		2.600.000,00	0,00	7,50	0,00	2.250.000,00	86,54	0,00	350.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		8.100.000,00	0,01	0,00	0,00	11.445.000,00	141,30	0,01	(3.345.000,00)
	Belanja Modal		19.300.000,00	0,02	0,00	0,00	15.850.000,00	82,12	0,01	3.450.000,00

NO	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rupiah)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rupiah)
					FISIK (%)	TERTIMBANG (%)	KEUANGAN (Rupiah)	KEUANGAN (%)	TERTIMBANG (%)	
69	Pengadaan Meubeler laboratorium GIS dan Perpetaan	Kec. Malinau Kota	30.000.000,00	0,02	0,09	0,00	29.697.000,00	98,99	0,02	303.000,00
	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Belanja Modal		30.000.000,00	0,02	0,09	0,00	29.697.000,00	98,99	0,02	303.000,00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		100.000.000,00				92.661.130,00			55.265.620,00
70	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Malinau dan Luar Malinau	50.000.000,00	0,04	0,00	0,00	47.926.750,00	95,85	0,04	50.000.000,00
	Belanja Pegawai		6.600.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		43.400.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TKPRD dan Pokja Penataan Ruang Kabupaten Malinau	Malinau dan Luar Malinau	50.000.000,00	0,04	79,60	0,03	44.734.380,00	89,47	0,04	5.265.620,00
	Belanja Pegawai		10.200.000,00	0,01	79,60	0,01	5.010.000,00	49,12	0,00	5.190.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		39.800.000,00	0,03	0,00	0,00	39.724.380,00	99,81	0,03	75.620,00
	Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH		121.669.791.271,65	100,16		#VALUE!	121.330.992.218,00		99,72	382.225.803,65

DOKUMENTASI

KEGIATAN TAHUN 2020







1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



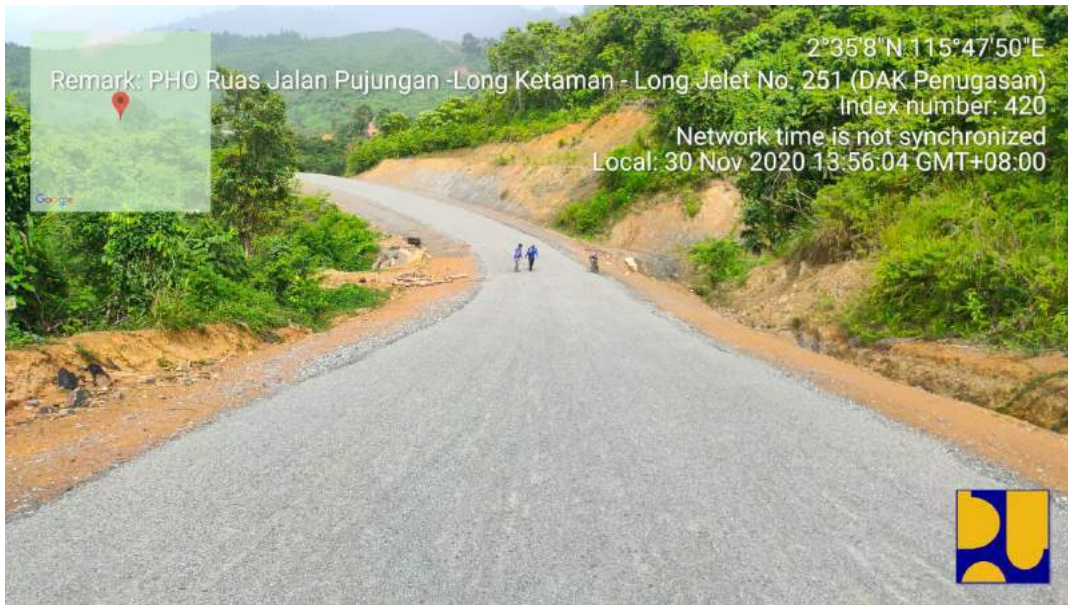
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR





3. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN







4. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE



5. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH



6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN



7. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK – KONFLIK PERTANAHAN



8. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN



9. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN UMUM



10. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH





11. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH





12. PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN



13. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG



14. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG



15. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG





PEMERINTAH 
KABUPATEN MALINAU
DPU-PR.PERKIM

KERJA KERAS

KERJA CEPAT

KERJA TEPAT

Jalan Raja Pandita RT. 10 No. 95 Tg. Belimbing

(0553) 21278

Malinau 77554